



TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P)



DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAHAN
KABUPATEN CIANJUR

Jl. Perintis Kemerdekaan Tlp (0263) 26510 e-mail kebersihan.cianjur@gmail.com



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015. LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2015. Penyusunan LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2015, merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP ini berupa indikator kinerja sasaran strategis Ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis akan dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2015 beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan melalui LAKIP ini.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan Persampahan Pertamanan dan Pemakaman. Selain itu, LAKIP ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada tahun-tahun mendatang. Di pihak lain, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyadari bahwa tantangan persampahan pertamanan dan pemakaman, semakin banyak dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun – tahun mendatang.



Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah LAKIP Dinas Kebersihan dan pertamanan yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Cianjur, Februari 2016

KEPALA DINAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN CIANJUR

M.YEYEN ROHYANDA, W.BA
NIP. 195802281983031009





IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai konsekuensi ditetapkan Inpres No. 7 tahun 1999 diketahui bersama bahwa dalam upaya mewujudkan Good Governance yakni pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu dikembangkan adanya suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Media tersebut berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah sebagai realisasi pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Cianjur ini memuat pokok - pokok laporan yang berisi informasi kinerja dari pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2015, baik yang berupa kegiatan rutin maupun pelayanan dalam bidang kebersihan dan pemakaman.

Diharapkan dari laporan ini akan dapat dievaluasi kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur tahun 2015 secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) - nya secara efisien dan efektif.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan Pedoman	4
1.4 Organisasi	6
1.5 Strategic Issued	8
BAB II PERENCAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategi	15
2.2 Penetapan Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Pengukuran Kinerja	18
3.3 Rencana Kinerja Tahunan	20
3.4 Pengukuran Kinerja	21
3.5 Akuntabilitas Keuangan	44
BAB IV PENUTUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur merupakan dinas teknis Pemerintah Kabupaten Cianjur yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas Daerah dan mempunyai tugas utama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Kebersihan dan Keindahan Kota.

Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai implementasi inpres no 07 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi DKP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2015.

Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan yang didasarkan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Cianjur dirasakan semakin berat karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu



mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka di perlukan pengembangan dan penetapan system serta prosedur kerja yang cepat tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas -tugas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Cianjur harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasilguna.

1.2 Landasan Hukum

Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, keberadaan LAKIP tersebut dilandasi oleh beberapa Peraturan Per-Undang-Undangan, yaitu :

- a. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang juknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja & tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.
- c. Permenpan No:PER/09/M.PAN/5/2007 ttg Pedoman Umum Penetapan IKU
- d. Permenpan 25/2012 No 20/2013 ttg Pedoman Evaluasi LAKIP
- e. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerinah.



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- g. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
- h. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 7 tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Oraganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
- m. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Oraganisasi dilingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
- o. Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang RPJMD kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025.

1.3 Tujuan Pedoman

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai



tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, di rumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menertibkan Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk



mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan di dasarkan suatu perencanaan strategik yang di tetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang di sampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Kebersihan dan Pertaman adalah sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari kegiatan-kegiatan yang akan dicapai, dan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009, tujuan penyusunan LAKIP mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2 Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan mempunyai tugas dalam hal



memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan kota.

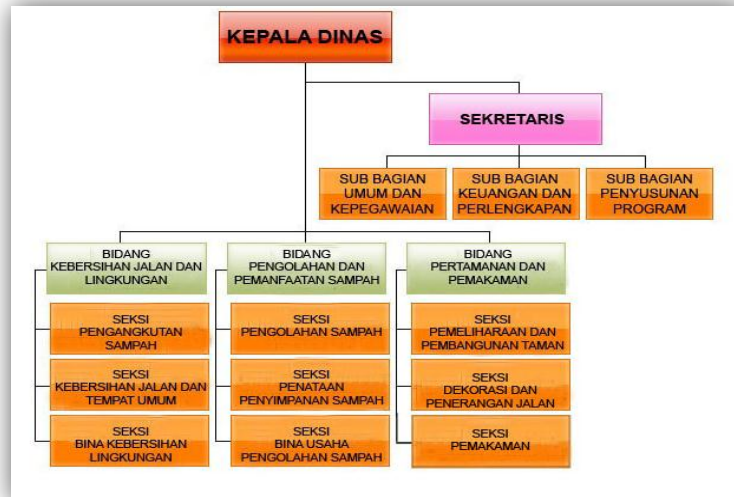
Adapun tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur selengkapnya telah diatur dengan keputusan Bupati Cianjur No 11 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi dan tata kerja unit organisasi dilingkung Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Cianjur dibantu oleh jajaran struktural :

- a. Sekretaris membawahi
 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program
- b. Bidang Kebersihan Jalan dan Lingkungan
 1. Seksi Kebersihan Jalan dan Tempat Umum
 2. Seksi Pengangkutan Sampah
 3. Seksi Bina Kebersihan Lingkungan
- c. Bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah
 1. Seksi Pengolahan Sampah
 2. Seksi Penataan Penyimpanan Sampah
 3. Seksi Bina Usaha Pengolahan Sampah
- d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 1. Seksi Pemeliharaan dan pembangunan Taman
 2. Seksi Dekorasi dan Penerangan
 3. Seksi Pemakaman

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Cianjur di dukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 377

- a) Jabatan struktural : 17
- b) PNS/Staf : 131
- c) Honorer/TKS : 246



1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan tata kerja unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah

a) Tugas Pokok :

Pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan tata kerja bagi seluruh pihak yang terkait dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

b) Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan umum di Bidang Penyelenggaraan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan ketentuan dan / atau peraturan per-undang-undangan yang berlaku;



3. Pembinaan dan melaksanakan tugas Dinas dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan ketentuan dan /atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

1.4 Strategic Issued

Permasalahan utama yang di hadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur yaitu :

1. Kualitas dan kuantitas dari sarana dan prasarana pengelolaan persampahan baik dilapangan maupun di TPA tersebut sudah tidak memadai dibandingkan dengan jumlah produksi sampah yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk.
2. Belum tersedianya area lahan TPA di setiap daerah, sehingga sampah di daerah belum dapat di angkut dan di tempatkan secara khusus seperti sukanagara, sehingga sampah di buang ke sungai-sungai.
3. Target wilayah pelayanan yang dilayani Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat ini baru melayani hanya di 11 kecamatan itupun wilayah perkotaan sedangkan untuk wilayah lain yang memang seharusnya mejadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang merupakan potensi untuk PAD belum terlayani karena fasilitas kendaraan operasional secara maksimal hanya mampu untuk 11 kecamatan.
4. Belum tersedianya area lahan pemakaman yang di sediakan khusus pemda di daerah sehingga capaian PAD untuk pemakaman relative kecil.
5. Permasalahan dalam peningkatan kapasitas SDM:



- a. Belum terpenuhinya kebutuhan PNS, sehingga pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh TKS dengan keterbatasan SDM yang di miliki pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- b. Penempatan formasi pegawai belum terselenggara secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Presiden Republik Indinnesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah



diberlakukan maka penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan Kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi

Perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi Pemerintah yaitu Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta ukuran Keberhasilan dan Kegagalan dalam pelaksanaannya. Adapun Rencana strategik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Rumusan visi hendaknya:

- a) Memberikan makna bagi sebuah organisasi dan memantapkan suatu keunggulan dari suatu organisasi.
- b) Dirumuskan secara *ad hoc* / *dibentuk* oleh organisasi dan secara insentif dan dikomunikasikan kepada anggota.



- c) Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;
- d) Memberikan arah dan fokus strategis yang jelas; Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- e) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi;
- f) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu:

- a) menarik komitmen dan menggerakkan orang;
- b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;
- c) menciptakan standar keunggulan; dan
- d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditanamkan pada setiap unsur sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi yaitu “ **Terwujudnya Cianjur yang Bersih, indah, dan nyaman menuju Cianjur yang lebih Sejahtera dan Berahlaktul Karimah .**”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan



dan peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategis yang telah dipilih.

Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu mampu :

- a) Menjaga hubungan yang dialogis dan harmonis dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah dalam meningkatkan Kota Cianjur yang tertata asri;
- b) Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup di Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- c) Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dalam hal Pengelolaan dan Pemanfaatan Persampahan di Bidang Kebersihan.

3. Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah :

- a) Meningkatkan pelayanan dan penanganan pengelolaan sampah.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana



c) Meningkatkan penanganan PJU

4. Sasaran

Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap indikator kinerja adalah :

- Meningkatnya Volume sampah yang terangkut dari TPS ke TPA Pasir Sembung
- Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau
- Meningkatnya pembangunan di lingkungan hidup di bidang pertamanan.

5. Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran)

Berikut ini strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang mengarah kepada kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu :

1. Melanjutkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, dengan melengkapi fasilitas yang belum tersedia;
2. Meningkatkan kemampuan pembiayaan lain selain anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, seperti Bantuan Provinsi, Hibah atau Pinjaman Luar Negeri.

6. Program

Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Cianjur tersebut, serta kondisi daerah pada saat ini maka disusun kembali Program Kerja Dinas untuk periode 2011 – 2016, agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu sebagai berikut :



1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
 - a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - b) Peningkatan operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
 - c) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
 - d) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
 - e) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan.
 - f) Peningkatan Pengolahan sampah menjadi kompos
 - g) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a) Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Adipura
3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
 - a) Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman
 - b) Penataan Tempat Pemakaman Umum
4. Program Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - a) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b) Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH)
 - c) Penataan Taman Prawatasari (Banprov)



2.1 Tabel Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan		Keterangan
1	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	6
1. Terwujudnya pemamfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penataan RTH	Terpeliharanya Ruang terbuka hijau	- Pengendalian perkembangan pusat kegiatan dengan membatasi kegiatan perkotaan yang berpotensi menyebabkan alih fungsi kawasan lindung - Upaya menjaga kualitas dan peningkatan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan, serta mengembalikan fungsi kawasan	- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	
	- Data base				
	- Rencana Tata Ruang Hijau			- Penataan Ruang Terbuka Hijau	
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA (ha)	Terpeliharanya kawasan TPA	Pengembangan ketersediaan prasarana utama baik secara kualitas maupun kuantitas; Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap wilayah pengembangan.	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	
2. Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal	- Pemeliharaan rutin berkala (titik) 1. Lampu hias 2. Penerangan jalan, 3. Lampu taman	- Pemeliharaan Rutin berkala lampu hias penerangan jalan	- Terpeliharanya lampu hias taman dan jalan		
	- Penataan pemakaman muslim dan non muslim (ha)		- Tertatanya Pemakaman Muslim dan Non muslim	- Program Pengelolaan Areal Pemakaman	



2.2 Tabel Penetapan Kinerja

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

SKPD : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan Lingkungan Hidup yang handal.	- 3.10.4 RTH Per satuan Wilayah Perkotaan	%	0.820
		- 3.10.5 Persentase Penanganan Sampah	%	5
		- 3.10.6 Tempat Pembuangan sampah TPST persatuan penduduk	%	18
2.	Berkembangnya wilayah di dukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal	- 3.11.19 Penatan Pemakaman Muslim Non Muslim	Ha	0



No	Program	Anggaran
1	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan	3,564,173,500
2	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan (Banprov)	1,458,000,000
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	199,800,000
4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	79,261,250
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemakaman	328,380,000
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,294,409,800
Jumlah		10,924,024,550

Jumlah Anggaran Wajib : Rp. 10.924024.550,-

Total Jumlah Anggaran 2015 : Rp. 15.052.945.500,-

Program Non Urusan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 3.090.875.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 808.371.950,-
3. Program Disiplin Aparatur : 128.800.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan : 39.195.900,-
5. Program Perencanaan dan Penganggaran : 61.678.100,-
6. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan : 3.564.173.500,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2015. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2015, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2015 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2015, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan lain sebagainya.



Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.



FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen Rencana Kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Bentuk dan cara pengisian Formulir RKT ini adalah sebagai berikut:

Formulir RKT

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan Lingkungan Hidup yang handal.	- 3.10.4 RTH Per satuan Wilayah Perkotaan - 3.10.5 Persentase Penanganan Sampah - 3.10.6 Tempat Pembuangan sampah TPST persatuan penduduk	0.820% 5% 18%
2.	Berkembangnya wilayah di dukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal	- 3.11.19 Penatan Pemakaman Muslim Non Muslim	0 Ha



Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

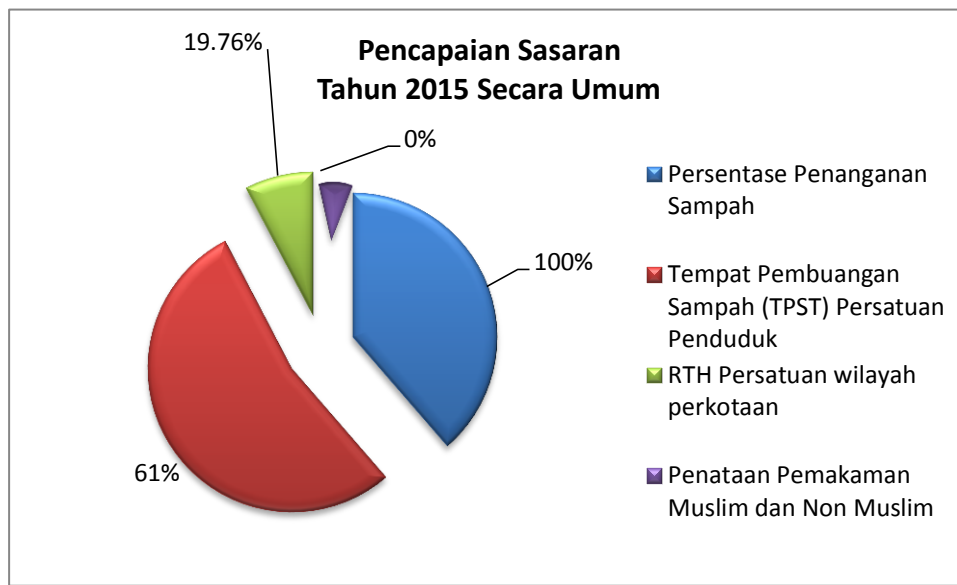
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3.10 Terwujudnya Pemanfaatan ruang yang berhasil guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	3.10.4 RTH persatuan wilayah perkotaan (rata-rata)	%	0.820	0.162	19.76 %
	3.10.5 Presentase penanganan sampah (%)	%	5	5	100
	3.10.6 Tempat Pembuangan sampah (TPST) persatuan penduduk	%	18	25	61%
3.11 Berkembangnya wilayah di dukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal	3.11.19 Penataan Pemakaman	Ha	0	0	0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2015 secara keseluruhan disajikan pada gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1

Pencapaian sasaran Tahun 2015 secara umum



Sumber : Hasil Pengolahan Data

Pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 sasaran dengan menggunakan 4 Indikator, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 4 indikator yang diukur, capaian kinerja persentase persampahan 100% dari target 5 % yang dapat di realisasikan sebesar 5% dari $\frac{\text{Jumlah sampah yang di kelola oleh DKP}}{\text{Timbulan Sampah yang dilayani}} \times 100 = \frac{78.912 m^3}{1.733.980 m^3} \times 100 = 5\%$, realisasi kinerja dalam indikator Persentase persampahan sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 22.2% sedangkan untuk jumlah sampah yang dikelola oleh dkp terdiri dari sampah pasar, hotel, jalur angkutan sampah pelabuhan objek wisata kelurahan yaitu sebesar $6.576 M^3 / \text{bulan} \times 12 = 78.912 m^3$ sedangkan untuk jumlah timbulan sampah dari 11 kecamatan yaitu sebanyak $144.498,3 M^3 / \text{bln} \times 12 = 1.733.980 M^3$.



Capaian untuk RTH persatuan wilayah perkotaan (rata-rata) 19.76 % dari target 0.820% yang dapat di realisasikan sebesar 0.162% dari $\frac{\text{Taman yang di kelola oleh DKP}}{\text{Luas RDTR}} \times 100 = \frac{9.26 \text{ Ha}}{5.700 \text{ Ha}} \times 100 = 0.162 \%$ nama taman dan tugu yang di kelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

1. Hutan Kota	: 20.000
2. Alun-alun Kota Cianjur	: 6.000
3. Lapangan Prawatasari	: 20.526
4. Taman Joglo	: 4.725
5. Taman Eks Terminal Muka	: 7.500
6. Taman PKK	: 180
7. Taman Paru-paru	: 116
8. Pulau Jalan BKKBN	: 50
9. Pulau Jalan AGJ	: 15
10. Pulau Jalan Rancagoong	: 100
11. Pulau Jalan Pasir Hayam	: 110
12. Pulau Jalan Dishubpar	: 5
13. Pulau Jalan Binamarga	: 25
14. Pulau Jalan Polsek Kota	: 72
15. Pulau Jalan Ayam Pelung	: 25
16. Pulau Jalan Tugu Siliwangi	: 3.784
17. Taman Pemisah Jalan Dr.Mawardi	: 1.700
18. Taman Pemisah Jalan KH.Abd.BinNuh	: 1.400
19. Tugu Batas Cianjur Bandung	: 332
20. Tugu Batas Cianjur - Sukabumi	: 332

21. Tugu Batas Cianjur Bogor	: 332
22. Taman Lingkar Timur	: 1.650
23. Tugu Pramuka	: 250
24. Bloombak Jalan Raya Bandung	: 900
25. Bloombak Jl. KH. Hayim Ashari	: 700
26. Taman Prawatasari	: 20.856

JUMLAH : 92.685 M²

Dan capaian Tempat pembuangan sampah (TPST) persatuan penduduk 61% dari target 18% yang dapat direalisasikan 25%

$$\frac{\text{Kapasitas TPA}}{\text{Jumlah penduduk yang terlayani}} \times 100 = \frac{123.370 \text{ m}^3}{502.033} \times 100 = 25\% \quad \text{karena}$$

realisasi makin tinggi maka makin rendah capaian kinerja sehingga menjadi
$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 = \frac{18 - (25 - 18)}{18} \times 100 = 61\%$$

Tahun 2011 adalah tahun pertama dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2012-2016. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas . Dinas Kebersihan masuk ke dalam misi daerah ke - 3 (3.10 & 3.11) dari misi kabupaten cianjur yaitu:

Misi 3 : Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Jumlah sasaran pada misi ini yang diukur kinerjanya: sebanyak 1 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 3 indikator. Sebanyak 1 indikator (100%) melebihi target yang telah ditetapkan tetapi, 3 indikator tidak mencapai target tetapi ada sebagian peningkatan dibanding kinerja tahun lalu.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 3 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan Lingkungan Hidup yang handal.

Indikator Kinerja	Hasil Th 2012	Hasil Th 2013	Hasil Th 2014	Hasil Th 2015	Tercapai/Tidak	Target Th 2015	Hasil sd 2015
RTH Persatuan Wilayah Perkotaan	47.121%	0.045%	0.094%	0.612%	√	0.820%	48.71 %
Persentase Penanganan Sampah	7.2%	5 %	5 %	5%	√	5%	22.2 %
Tempat Pembuangan sampah TPST persatuan penduduk	1.57%	28.38 %	20 %	61%	X	18%	110.95 %

Sumber : Bidang Kebersihan dan Jalan Lingkungan, Bidang TPA, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.

Dari keterangan capaian yang dicapai Dinas Kebersihan kendala dari beberapa indikator yang target dan realisasinya kecil yaitu :

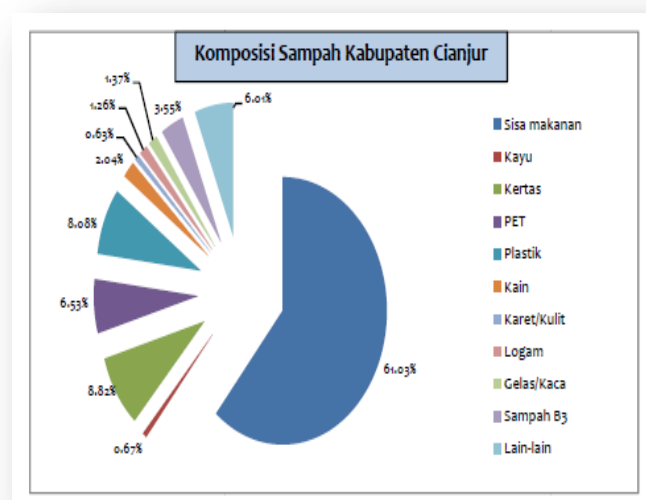
1. Persentase penanganan persampahan dari target 5 % Dinas Kebersihan dan Pertamanan mampu merealisasikan 5 % tetapi meskipun capaian kinerja mampu 100% Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum puas dengan capaian yang ada karena pelayanan persampahan yang di layani baru mencakup 11 wilayah kecamatan dari target yang pada dokumen Renstra yaitu 13 kecamatan adapun sampah yang tidak di angkut oleh Dinas Kebersihan di kelola oleh bank sampah diantaranya yaitu Bank sampah Sindanglaka.

Sementara itu Sumber sampah di Kabupaten Cianjur berasal dari kawasan permukiman dan Non permukiman, kawasan permukiman mencakup kawasan *low income*, *middle income*, dan *high income*. Sumber sampah dari kawasan non permukiman berasal dari sekolah, kantor, pertokoan, pasar, rumah makan, fasilitas kesehatan, hotel/penginapan, taman, dan sapuan jalan. Berdasarkan literature diketahui potensi timbunan sampah berdasarkan sumbernya seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Jenis Sumber	Total	
	Jumlah	Satuan
Permukiman	2.270.624	Orang
Komersial	Restauran	5.580 kursi
	Toko	5.500 toko
Hotel	3.500	bed
Kantor	880.713	Orang
Sekolah	852.457	Murid
Pasar Tradisional	50.000	m ²
Penyapuan Jalan	1.301,50	km
Penyapuan Taman	5,536	Ha

Sumber : Cianjur Dalam Angka, 2014




Komposisi sampah yang dipilah terdiri dari 11 komponen yaitu sisa makanan, kayu, kertas, PET, plastik, kain, karet/kulit, logam, gelas/kaca, sampah B3 dan lain-lain. Persentase komposisi fisik sampah berdasarkan hasil survey primer yang dilakukan oleh konsultan dalam buku masterplan persampahan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.





RTH Persatuan wilayah perkotaan dari target 0.820 Dinas Kebersihan dan Pertamanan mampu merealisasikan 0.162% dengan capaian 19.76% pencapaian kinerja yang kurang dari yang ditargetkan dikarenakan luasan wilayah taman dan pemakaman yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih tidak terlalu luas jikalau di bandingkan dengan jumlah RDTR Kabupaten Cianjur yang ada. Tetapi meskipun baru sedikit luasan yang di kelola disbanding jumlah RDTR RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga. Kendala berikutnya yaitu kawasan perkotaan Cianjur, secara eksisting masih memiliki ruang terbuka hijau yang cukup besar yaitu berupa pertanian sawah. Penggunaan lahan untuk sawah masih lebih besar dibandingkan dengan penggunaan lahan ruang terbuka hijau (RTH) lainnya. Tetapi penggunaan lahan untuk sawahnya cenderung akan mengalami alih fungsi lahan menjadi lahan permukiman dan perumahan.

Berikut kami tampilkan sebagian gambar Taman taman kota dan vegetasi yang di tanamnya sebagaimana gambar yang ada di bawah ini :

No.	JENIS RTH	Foto	Vegetasi	Kepemilikan	Kondisi
4	Taman Kota		Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Publik	Terawat dan tertata dengan baik



			Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Trembesi (Ki Hujan) dan rumput	Publik	Pada Umumnya terlihat terawat dengan baik



			Angsana, Soka, dan Jawer Kotok	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Campaka, Lidah Mertua, dan rumput	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Lidah Mertua, Campaka, dan rumput	Publik	Terawat dan tertata dengan baik



			Angsana, Soka, dan Jawer Kotok	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Angsana, Soka, Jawer Kotok, Teh-tehan dan rumput	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Angsana, Soka, Jawer Kotok, Teh-tehan dan rumput	Publik	Terawat dan tertata dengan baik



			Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Privat	Terawat dan tertata dengan baik



			Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Teh-tehan dan rumput	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
			Campuran berbagai macam jenis tanaman hias dan pohon	Publik	Terawat dan tertata dengan baik



Taman Tugu Pramuka		Campuran berbagai jenis pohon dan tanaman bunga seperti : Melati, Cemara, Kriminil merah, Soka, Angsana, Pisang, Palm, Lidah Mertua, Kelapa, Bunga Kertas, Beringin, Bambu Hias dan Rumput.	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
		Campuran berbagai jenis pohon dan tanaman bunga seperti : Cemara, Kriminil merah, Soka, Angsana, Pisang, Palm, Lidah Mertua, Kelapa, Bunga Kertas, dan melati	Publik	Terawat dan tertata dengan baik
		Campuran pohon dan rumput	Publik	Terawat dan tertata dengan baik



	Taman Makam Pahlawan		Beringin, Datura Sanguine, Angsana, dan Rumput	Publik	Cukup dan tertata dengan baik
	Taman Sirnalaya II		Beringin, angšana	Publik	Kurang terawat dan tertata dengan baik
	Tugu Adipura		Trembesi, Cemara, Angšana, Soka, Glodongan, dan Rumput	Publik	Terawat dan tertata dengan baik

2. Tempat Pembuangan Sampah (TPST) persatuan penduduk Dinas Kebersihan dan Pertamanan mampu merealisasikan 25 % dari target 18 % semakin tinggi realisasi makin rendah capaian kinerja maka di pergunakan rumus ke 2 yaitu
- $$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \% \text{ hasil capaian kinerja } 61 \%$$

Capaian indikator 61% ini merupakan nilai kurang baik karena daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPPAS) sudah tidak memadai dengan bertambahnya timbunan sampah maka kapasitas TPPAS sudah tidak maksimal keadaan TPPAS Pasir sembung saat ini seperti pada gambar berikut :



Zona Landfill berbatasan dengan areal persawahan dan sungai. Lahan yang akan dibebaskan adalah lahan sebrang sungai tersebut



Kondisi Zona Landfill



Zona Landfill Berdekatan Dengan Permukiman Penduduk

Landfill di TPPAS Pasir Sembung seluas 6,1 Ha, pengoperasian sistem masih dilakukan secara open dumping dan mulai beroperasi dari tahun 1978. TPA ini menerima sampah dari 11 Kecamatan yang ada di wilayah perkotaan Kabupaten Cianjur. Di TPA belum tersedia jembatan timbang, pencatatan sampah yang masuk ke TPA dilakukan secara manual, dengan

menghitung jumlah armada pengangkut sampah yang masuk ke TPA setiap harinya. Kondisi TPPAS Pasir Sembung sudah penuh sampai tahun ini sehingga diperlukan perluasan lahan area TPA untuk memperpanjang umur layan TPA. Dari indikator TPST persatuan penduduk kendalanya yaitu kapasitas TPA yang sudah tidak bisa menampung sampah dimana seharusnya sudah harus di relokasi dengan keadaan sekarang rencana relokasi tidak memungkinkan di karenakan kendala yang harus di hadapi yaitu pembebasan lahan lokasi TPA di Cikalong seluas ± 100 Ha tetapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengantisipasi lokasi yang belum terealisasi maka akan melakukan perluasan wilayah TPA Pasirsembung



Rencana Perluasan TPA

dan melakukan pengurangan timbulan sampah dengan menggunakan Teknologi yaitu pembakaran dengan menggunakan alat yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Dinas Kebersihan telah mengajukan alat pembakaran sampah (incinerator) untuk tahun 2016.

Untuk antisipasi perlu adanya Relokasi TPPAS tersebut dan perlu adanya perubahan pengertian dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah menjadi Tempat Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah (TPPS) yang direncanakan di Desa Mekarsari Kecamatan Cikalongkulon tetapi anggaran yang telah direalisasikan untuk tahun 2015 yaitu sosialisasi terhadap masyarakat sekitar rencana TPPS Mekarsari dan rencana di tahun 2016 baru akan mereview DED TPPS Mekarsari dalam proses perencanaan TPPS Mekarsari ini ada beberapa kendala yaitu anggaran untuk pembebasan lahan TPA harus menggunakan APBD II yang tidak membutuhkan anggaran yang kecil yaitu sekitar \pm Rp. 12.000.000.000,- untuk 100 Ha

sedangkan untuk pembangunan fisik Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah mengajukan anggaran kepada Kementrian PU dan menunggu realisasi lahan terlebih dahulu.

2. Sasaran : Berkembangnya wilayah di dukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal

Indikator Kinerja	Hasil Th 2012	Hasil Th 2013	Hasil Th 2014	Target Th 2015	Tercapai/Tidak	Hasil sd 2015	Hasil sd 2015
Penataan Pemakaman Muslim Non Muslim	2.8 Ha	0	1.7	0 Ha	X	0 Ha	4.5 Ha

Sumber : Bidang Pertamanan & Pemakaman. Ket: √= mencapai target, X= tidak mencapai target.

1. Penataan Pemakaman muslim dan non muslim Dinas Kebersihan dan pertamanan tidak ada realisasi untuk menambahkan anggaran karena keterbatasan anggaran dan berfokus terhadap pemeliharaan TPU yang di kelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
2. Kemudian masih kurangnya dokumen perencanaan untuk melakukan pendataan lahan pemakaman ataupun makam yang sudah ada dan bias unttuk menambah potensi PAD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Hasil Tahun 2015

Pada tahun 2015, kinerja sasaran di atas masih dalam angka yang tetap, hal ini terlihat dari angka persentase penanganan sampah dari 5 % pada tahun 2013 masih menunjukkan angka 5 % . tetapi sampah semakin berkurang angka yang menunjukkan angka masih 5 % tersebut merupakan bukan sesuatu kinerja yang buruk kinerja tetap maksimal tetapi kendalanya yaitu pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan bertambah sehingga menghasilkan produksi sampah yang besar. Berdasarkan data timbulan sampah untuk tiap jenis sumber sampah, kuantitas setiap jenis sumber sampah dan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur, maka diperoleh bahwa timbulan sampah rata-rata Kabupaten Cianjur adalah 2 liter/orang/hari. Angka ini sesuai dengan nilai untuk timbulan sampah untuk kota sedang yaitu 2 liter/orang/hari. Kinerja sasaran pemakaman tersebut mengalami stag pencapaian kinerja dikarenakan tidak ada penambahan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada tahun 2015 ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan fokus anggaran terhadap pemeliharaan TPU dan Penataan TPU -TPU yang sudah ada.

Untuk mencapai sasaran tersebut, untuk tahun 2015 didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

➤ Program Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
2. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lapangan Prawatasari)

➤ Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
3. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan



4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
6. Pengolahan Sampah menjadi Kompos
7. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA
- Program Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran Lingkungan Hidup
 1. Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Adipura



Capaian Target pendapatan bidang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2015

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%) th 2014	T a r g e t th 2015	Realisasi th 2015	Capaian Kinerja (%) th 2015
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/	100.24 %	Rp. 549.481.005.00,-	Rp. 555.760.000,-	101.14%
2	Kebersihan	211.07 %	Rp. 52.809.142.50,-	Rp. 133.245.000,-	252.31 %
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus	67.17 %	Rp. 48.000.000.00,-	Rp. 25.760.000,-	53.67%
J u m l a h		105.58 %	Rp. 650.290.147.50,-	Rp. 714.765.000,-	109.91%



Dari table mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2015 seperti diatas dapat dilihat adanya kenaikan penerimaan dari tahun sebelumnya.

Dari 3 (tiga) jenis pendapatan/retribusi yang diterima :

1. Pelayanan Persampahan /Kebersihan
2. Pelayanan Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus
3. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pencapaian kinerja dengan indikator :

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Kebersihan dan Pertamanan, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada aparat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, sehingga jumlah aparat yang mampu dibidang teknis semakin meningkat;



Meningkatkan Mutu Pelayanan di bidang Kebersihan dan Pertamanan

No	Pelayanan DKP	Satuan	Target/Tahun 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Volume Sampah terangkut terhadap jumlah produksi	M3/th	1.733.980 m3	79.912 m3	5 %
2	Rasio luas cakupan layanan kebersihan terhadap luas kota	Kec.	13	11	84.61 %
3	Rasio pelayanan penyedotan tinja terhadap permintaan	M3/Hari	340 M3	338.5 M3	99%
4	Rasio pelayanan pemakaman terhadap permintaan	Titik makam/ M2	15 TPU /263.136	11 TPU /219.280	73.3 %

Dari data berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) jenis pelayanan mencapai nilai di atas 50%.

➤ AKUNTABILITAS KEUANGAN

APBD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2015 ditetapkan Rp. 21.910.242.107,- (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Rupiah), terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.857.296.607,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 15.052.945.500,-

Akuntabilitas keuangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2015 dinilai dari aspek pendapatan dan belanja langsung.

Sedangkan anggaran dan realisasi APBD 2015 digunakan sebagai input pada masing-masing kegiatan yang akan diajukan dalam lampiran tentang pengukuran kinerja kegiatan.

Anggaran dan realisasi APBD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015, adalah :

U R A I A N	CAPAIAN KINERJA (%) th 2014	TARGET ANGGARAN th 2015	REALISASI (Rp.) Th 2015	CAPAIAN KINERJA (%) th 2015
a. Pendapatan : - Retribusi Pelayanananan Kebersihan - Dan seterusnya	105.58%	650.290.147.50	714.765.000,-	109.91%
Jumlah Pendapatan				
b. Belanja :				
- Belanja Tidak Langsung	98.81 %	6.857.296.607,-	6.790.448.610,-	99.03 %
- Belanja Langsung	91.30 %	15.052.945.500,-	14.835.738.968,-	98.56 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2015 mencapai di atas 50 %.



APBD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur, serta
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Laporan Realisasi Kinerja

Dinas Kebersihan Pertamanan Kab. Cianjur

No	Program	Kegiatan	Target anggaran	Realisasi anggaran	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.090.875.000,00	3.073.563.517	99,44
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	900.000,00	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.500.000,00	39.215.417,00	84,33
		Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29.140.000,00	24.584.000,00	84,37
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.807.870.000,00	2.807.870.000,00	100,00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.999.100,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.430.000,00	88,60
		Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	0,00	0,00



No	Program	Kegiatan	Target anggaran	Realisasi anggaran	%
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	48.300.000,00	43.400.000,00	89,86
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
		Penyediaan jasa Pengamanan Kantor Belanja Barang dan Jasa	48.165.000,00	48.165.000,00	100,00
		Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		808.371.950,00	808.296.651,00	99,99
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	00,0	00,0	00,0
		Pengadaan Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	782.077.600,00	782.002.301,00	99,99
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (L)	2.494.350,00	2.494.350,00	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin		128.800.000,00	128.156.000,00	99,50



No	Program	Kegiatan	Target anggaran	Realisasi anggaran	%
Aparatur					
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	128.800.000,00	128.156.000,00	99,50
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		39.195.900,00	37.145.900,00	94,77
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.515.900,00	15.515.900,00	100,00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7.000.000,00	6.850.000,00	97,86
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai	8.220.000,00	7.070.000,00	86,01
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Belanja Pegawai	8.460.000,00	7.710.000,00	91,13
5	Program Perencanaan dan Penggangan		61.678.100,00	59.888.100,00	97,10
		Penyusunan Renja dan Renstra SOPD	23.960.600,00	23.610.600,00	98,54
		Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD	37.717.500,00	36.277.500,00	96,18
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		5.022.173.500,00	4.979.049.500,00	99,14
		Penyediaan Prasarana dan	83.575.000,00	82.492.500,00	98,70



No	Program	Kegiatan	Target anggaran	Realisasi anggaran	%
		Sarana Pengelolaan Persampahan			
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.458.000.000,-	1.439.351.000,-	98,72
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	2.176.280.500,00	2.175.944.500,00	99,98
		Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	202.475.000,00	192.456.000,00	95,05
		Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	120.845.000,00	109.895.000,00	90,94
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	83.910.000,00	83.910.000,00	100,00
		Peningkatan Pengelolaan Sampah menjadi Kompos	103.090.000,00	103.077.500,00	99,99
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA	778.545.500,00	776.470.500,00	99,73
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan (L)	2.985.000,00	2.985.000,00	100,00
		Peningkatan Pengelolaan Sampah menjadi Kompos (L)	12.467.500,00	12.467.500,00	100,00
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	0,00	1.439.351.000,00	0,00
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	199.800.000,00	199.800.000,00	100,00



No	Program	Kegiatan	Target anggaran	Realisasi anggaran	%
Hidup					
8	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		79.261.250,00	72.811.250,00	91,86
		Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman	72.268.000,00	65.818.000,00	91,07
9		Penataan Tempat Pemakaman Umum (L)	6.993.250,00	6.993.250,00	100,00
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pengadaan Mobil Jenazah (L-Banprov 2014) (L)	328.380.000,00	328.380.000,00	100,00
11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		5.294.409.800,00	5.148.648.050,00	97,25
		Penataan RTH	133.825.000,00	131.050.000,00	97,93
12		Pemeliharaan RTH	365.340.000,00	363.938.750,00	99,62
13		Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lapangan Prawatasari)	4.592.071.250,00	4.459.280.750,00	97,11
14		Penataan RTH (L)	20.198.200,00	20.198.200,00	100,00
15		Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lapangan Prawatasari) (L)	182.975.350,00	174.180.350,00	95,19



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP,. Dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja, adalah laporan yang berisi penilaian atas pencapaian kinerja dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan.

LAKIP
TAHUN 2015